



PAPER – OPEN ACCESS

Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Peladang Berpindah di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara

Author : Jamaluddin Hos dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.602
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Peladang Berpindah di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara

Disaster Mitigation Based on Local Wisdom in Moving Farmers in Asera District, Konawe Utara Regency

Jamaluddin Hos^a, Sarpin^b, Suharty Roslan^c

^{a, b, c} Dosen Tetap Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari

Email : jhos_mard@yahoo.co.id, jamaluddin_hos@uho.ac.id; sarpinezhar1969@gmail.com; suhartyroslan1967@gmail.com

Abstract

The Tolaki tribe, which is a native who inhabits the mainland areas of Southeast Sulawesi Province, some still manage their lives through traditional natural resource management. Until now, strong traditions and traditions for preserving the environment and forests in the Tolaki ethnic group are still maintained. This custom and tradition is always inherited from generation to generation. Shifting cultivation or monda'u (Tolaki language) is the main livelihood of the Tolaki tribe. Shifting cultivation activities have a strong dependence on natural environmental conditions. The concept of monda'u for the Tolaki community is one form of institutional management of fields and forests that points to the entire process of processing land fields from land clearing to storing crops. This study was directed to find out and study the local wisdom of the Tolaki people in shifting cultivation activities (monda'u) related to disaster mitigation, especially floods, landslides and fires. The research approach used is a qualitative approach with the main data collection techniques are observation and in-depth interviews. The results of the study showed that in the monda'u institution, there was a lot of local wisdom that had been maintained for generations so that it still paid attention to the carrying capacity and sustainability of the forest. This shows that in the activities of monda'u, the Tolaki tribe has long provided education to avoid natural disasters from generation to generation. Norms related to determining the location of fields, the right time for farming, rules and procedures for opening, burning, and clearing land in the monda'u tradition are full of mitigation of natural disasters floods, landslides and fires.

Keywords: disaster mitigation; monda'u; shifting cultivation

Abstrak

Masyarakat suku Tolaki yang merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah-wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian masih mengelola kehidupannya melalui pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara tradisional. Hingga kini masih terpelihara kuat adat dan tradisi pemeliharaan kelestarian lingkungan dan hutan di kalangan suku bangsa Tolaki. Adat dan tradisi ini senantiasa diwariskan secara turun temurun. Perladangan berpindah atau *monda'u* (bahasa Tolaki) merupakan mata pencaharian hidup utama masyarakat suku Tolaki. Aktivitas perladangan berpindah memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kondisi lingkungan alam. Konsep *monda'u* bagi masyarakat Tolaki merupakan salah satu wujud kelembagaan pengelolaan ladang dan hutan yang menunjuk pada keseluruhan proses aktivitas pengolahan tanah ladang mulai dari pembukaan lahan hingga penyimpanan hasil panen. Kajian ini diarahkan untuk mengetahui dan mengkaji kearifan-kearifan lokal masyarakat Suku Tolaki dalam aktivitas perladangan berpindah (*monda'u*) berkaitan dengan mitigasi kebencanaan, terutama bencana alam banjir, tanah longsor dan kebakaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pranata *monda'u*, terdapat banyak kearifan lokal yang secara turun temurun dipertahankan sehingga tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian hutan. Hal ini menunjukkan bahwa pada aktivitas *monda'u*, masyarakat suku Tolaki sudah sejak lama memberikan pendidikan menghindari bencana alam secara turun-temurun. Norma-norma yang terkait dengan penentuan letak lokasi ladang, waktu yang tepat untuk berladang, kaidah dan tata cara membuka, membakar, dan membersihkan lahan dalam tradisi *monda'u* sarat dengan mitigasi terhadap bencana alam banjir, longsor dan kebakaran.

Kata kunci: mitigasi bencana; *monda'u*; perladangan berpindah.

1. Pendahuluan

Secara historis, bangsa Indonesia memiliki banyak pengalaman terhadap bencana alam. Kondisi geologis dan geomorfologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng samudra berdampak pada seringnya terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami. Demikian pula kondisi wilayah di mana terdapat banyak sekali gunung api, telah mencatat banyaknya peristiwa letusan yang menimbulkan banyak korban. Seringnya terjadi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, sesungguhnya telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kebencanaan yang secara turun temurun diwariskan kepada setiap generasi. Masyarakat lokal di Indonesia pada umumnya telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal terhadap gejala-gejala

bencana alam dan melakukan mitigasi kebencanaan. Pengetahuan dan kearifan-kearifan budaya lokal dalam menyikapi bencana alam diperoleh dari berbagai pengalaman dalam berinteraksi dengan ekosistemnya. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sebagai konsekuensi dari proses modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, cenderung mengingkari keberadaan kearifan lokal dan kekayaan sosial budaya masyarakat adat. Ideologi *developmentalisme* memang menjadikan tradisionalisme sebagai lawan dari modernisasi sehingga semua yang bersifat tradisional, termasuk kekayaan budaya dan kearifan lokal dianggap tidak adaptif bahkan bertentangan dengan prinsip kemajuan dan perkembangan zaman[1].

Akhir-akhir ini, jika terjadi bencana pada umumnya kita kelabakan dan tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk melakukan penanggulangan secara cermat. Hal ini disebabkan karena kita tidak memiliki sistem deteksi dini bencana yang secara luas dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakatpun tidak terlatih menghadapi bencana, meskipun telah berulang kali terjadi. Jika terjadi bencana, pada umumnya masyarakat korban sangat tergantung pada respon pemerintah yang kadang-kadang juga tidak bersifat taktis dan strategis. Padahal jika digali dan dikaji lebih dalam, berbagai tradisi dan nilai budaya masyarakat lokal di Indonesia yang telah berabad-abad lamanya menjadi pedoman hidup, didalamnya banyak kearifan budaya tentang mitigasi bencana sebagaimana tercermin antara lain dalam pengelolaan tanah, sistem irigasi, pengolahan hutan, sistem gotong royong dan sebagainya[2]. Setiap masyarakat adat di Indonesia, sesungguhnya telah terdapat sistem mitigasi bencana yang telah diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat suku bangsa Tolaki, khususnya di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sebagian besar bermata pencaharian sebagai peladang. Kegiatan berladang ini disebut *monda'u*, yaitu keseluruhan proses aktivitas pengolahan tanah ladang mulai dari pembukaan lahan hingga penyimpanan hasil panen. Pada aktivitas *monda'u*, masyarakat suku Tolaki sudah sejak lama memberikan pendidikan menghindari bencana alam secara turun-temurun Inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menggali dan mengkaji kearifan lokal masyarakat Suku Tolaki dalam aktivitas perladangan berpindah (*monda'u*) berkaitan dengan mitigasi bencana.

2. Tinjauan Pustaka

Tingkat kerawanan bencana yang tinggi yang dimiliki Indonesia, sudah merupakan pengetahuan umum. Posisi geografis Indonesia dikelilingi lempeng tektonik dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan jalur *The Pasific Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik), yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Majalah Arsip Edisi 60[3] mengingatkan perlunya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah cincin api ini memiliki kewaspadaan yang tinggi. Sementara itu, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama, bahasa daerah dan adat istiadat juga memungkinkan terjadinya gesekan kepentingan antargolongan. Kemajemukan ini, jika tidak dapat dikelola secara tepat dan adil dapat menimbulkan bencana sosial (non-alam) berupa konflik sosial yang mengancam keutuhan sebagai bangsa.

Konsep mitigasi (*mitigate*) di sini dimaksudkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi bahaya dan kerugian. Dengan demikian, mitigasi bencana mencakup segala upaya dan kegiatan manusia melakukan perlindungan mulai dari antisipasi sebelum bencana terjadi, melakukan evaluasi terhadap bahaya bencana sampai pada penanganan dan penanggulangan bencana yang dapat berupa tindakan penyelamatan, rehabilitasi dan relokasi korban bencana. Mitigasi bencana menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003, adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan, kewaspadaan dan berbagai kemampuan untuk mengatasinya[4]. Sementara itu Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya[5].

Kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya bencana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut di atas, sesungguhnya dapat digali dari kearifan lokal yang banyak tersebar di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Masyarakat Simeulue di Aceh misalnya pada umumnya telah memiliki sikap tanggap dalam menghadapi bencana alam yang bersumber dari leluhur mereka. Ketika bencana gempa dan tsunami 2004 silam, masyarakat Simeulue sendiri sebenarnya juga tak luput dari terjangan tsunami. Namun karena pengetahuan mereka sudah jauh lebih maju terhadap bencana gempa dan tsunami, maka jumlah korban di Simeulue terbilang kecil hanya berjumlah enam jiwa meninggal. Tsunami yang dalam bahasa lokal mereka menyebutnya *smong* (air bah besar) telah lama mereka mengetahui gejalanya, yaitu apabila terjadi gempa dan air laut serta merta surut, maka mereka akan lari ke perbukitan, karena itu sebagai isyarat akan terjadinya tsunami[6].

Demikian pula halnya dengan masyarakat suku Baduy yang sejak lama secara ketat mempraktekkan pencagaran alam (*nature conservation*) sebagaimana ditunjukkan dalam konsistensinya yang sangat memperhatikan kelestarian hutan. Tanggung jawab keberlanjutan kelestarian hutan tertanam dalam kesadaran setiap warga masyarakat Baduy. Kerusakan hutan berarti kerusakan sumber kehidupan dan menjaga hutan berarti menjaga keberlanjutan ladang. Sistem nilai ini kemudian melahirkan pola-pola perilaku perladangan yang berbasis kelestarian hutan. Lahan hutan yang letaknya berada di luar wilayah permukiman penduduk, mereka buka dan mengolahnya menjadi ladang setiap tahun secara bergilir[7]. Sikap dan perilaku masyarakat Baduy jelas telah memberi andil terhadap pengurangan resiko bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh penggundulan hutan.

Mitigasi bencana yang bersumber dari kearifan lokal juga dapat ditemukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi Jawa Tengah. Sebelum terjadi letusan Gunung Merapi, mereka telah memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda bakal terjadinya letusan melalui perilaku hewan. Turunnya hewan-hewan dari puncak gunung merapi, keluarnya hewan-hewan dari hutan belantara, perilaku burung-burung atau hewan lainnya mengeluarkan bunyi suara yang tidak biasa, merupakan sebagian dari tanda-tanda yang mereka pahami sebagai indikasi akan terjadinya letusan Gunung Merapi[8].

Menurut Soendjoto dan Wahyu[9], kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, memiliki keterkaitan dengan alam dalam jangka waktu yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis, dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Kearifan lokal memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah dan mengurangi resiko bencana. Kearifan lokal tak lain adalah ekstraksi dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan secara turun temurun dari para leluhur atau orang-orang terdahulu yang telah mengalami kejadian bencana[10]. Kearifan lokal telah membentuk perilaku adaptif terhadap lingkungan sekitar yang telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam menghadapi dan mensikapi bencana yang datang. Pada umumnya masyarakat tradisional dapat hidup selaras dengan lingkungan alam sekitar, sehingga membentuk sistem nilai budaya dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subyek penelitian, dalam hal ini para aktor peladang berpindah serta pengamatan secara langsung setiap gerak masyarakat dalam melakoni aktivitas perladangan. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka jumlah informan tidak merupakan syarat yang utama. Penetapan dan jumlah informan dilakukan secara snowball sampling sampai terjadinya kejenuhan informasi.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara bersama-sama, utamanya data-data yang bersifat primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Setelah data diperoleh pada saat itu pula dilakukan pengelompokan data. Hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan dan memilah-milah serta memilih informasi dan data yang berasal dari berbagai sumber, sehingga mempermudah dalam menganalisis. Data-data dianalisis melalui interpretative understanding, yang berarti bahwa penelitian melakukan penafsiran atau “pemaknaan” terhadap data dan fakta yang berhubungan dengan mitigasi bencana.

4. Temuan dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Asera merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Kecamatan Asera bermata pencaharian sebagai peladang. Keluarga petani peladang memiliki karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan keluarga lain pada umumnya. Kegiatan perladangan (*monda'u*) mereka jalani dengan menempuh jarak 5 – 10 km dari perkampungan atau rumah tempat tinggal mereka.

Pengolahan tanah untuk suatu aktivitas perladangan dilakukan secara berpindah-pindah pada lokasi-lokasi yang dipandang subur dan dapat menghasilkan produksi yang diharapkan. Selain melibatkan anggota keluarga, pengolahan tanah ladang biasanya juga mendapat bantuan dari tetangga-tetangga yang terdekat secara gotong royong. Karena dilakukan secara berpindah-pindah, lokasi lahan bekas aktivitas perladangan kembali ditumbuhi pepohonan dan semak belukar yang disebut *anahoma*. Kawasan hutan belukar bekas lahan perladangan ini biasanya merupakan areal bekas olahan dari sejumlah peladang yang masih berasal dari satu keluarga besar (kerabat). Berdasarkan ketentuan hukum adat Tolaki, *anahoma* tersebut dapat digarap kembali oleh yang bersangkutan atau anak cucu mereka setelah sembilan tahun ditinggalkan. Ketentuan jangka waktu pengolahan kembali areal tanah bekas perladangan ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan semakin menyempitnya lahan perladangan. Penyempitan lahan perladangan ini, selain disebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran dan migrasi masuk, juga karena sebagian areal hutan telah berubah status kepemilikan dari kepemilikan berdasarkan hukum adat (hak ulayat) menjadi kepemilikan berdasarkan hukum nasional.

Berdasarkan sistem perladangan yang berpindah-pindah melahirkan konsep kepemilikan lahan yang khas. Semua areal tanah bekas ladang (*anahoma*), termasuk di dalamnya rawa-rawa tempat tumbuhnya pohon sagu, area tempat melepaskan sapi atau kerbau, bagian batang sungai dan rawa tempat menangkap ikan, lokasi lahan yang penuh tanaman, tanah di mana terdapat kuburan leluhur, semuanya menurut hukum adat merupakan tanah atau lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu keluarga, baik karena keluarga tersebut pernah menggarapnya secara langsung ataupun karena tanah tersebut telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

4.2. Sistem Perladangan Masyarakat Suku Tolaki

Sebagaimana halnya masyarakat suku Tolaki lainnya, masyarakat yang berdiam di Kecamatan Asera sampai saat ini masih mempertahankan sistem perladangan berpindah dan pembukaan lahan dengan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh

nenek moyang mereka sebagai sistem mata pencaharian mereka. Perladangan berpindah dilakukan dengan sistem nilai dan norma yang tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian hutan. Kegiatan perladangan berpindah ini, dilakalangan orang Tolaki disebut *Monda'u*. Kegiatan *monda'u* adalah keseluruhan aktivitas perladangan yang dimulai dari pembukaan lahan di kawasan hutan sampai dengan kegiatan penyimpanan hasil panen di lumbung. Jika diamati secara seksama, kegiatan *Monda'u* secara keseluruhan berproses dalam 11 tahapan. Diawali dengan 1) *monggiikii ando'olo* atau memilih lokasi lahan perladangan, 2) melakukan upacara ritual pra *Monda'u* (*mohoto o wuta*) agar usaha perladangannya berhasil, 3) melakukan penebangan pepohonan kecil, menebas akar-akaran dan lain-lain (*mosalei*), 4) melakukan penebangan pepohonan yang berukuran besar (*mombodoi/monduehi*), 5) melakukan pembakaran hasil penebangan (*humunu*), dan 6) melakukan pembersihan sisa-sisa pembakaran (*mo'enggai*). Kegiatan selanjutnya adalah 7) membuat pagar (*mewala*), yang dilanjutkan dengan 8) menanam padi (*motasu*), serta 9) menyiangi atau membersihkan rerumputan yang tumbuh di sela-sela tanaman dan menjaga tanaman (*Mosaira* dan *mete'ia*). Adapun tahapan terakhir kegiatan *monda'u* adalah 10) memanen hasil (*mosawi*) dan 11) memasukan hasil panen ke dalam lumbung (*molonggo*).

Membuka lahan perladangan diawali dengan pemilihan lokasi atau *Mongiikii ando'olo*. Lokasi lahan dipilih berdasarkan topografi, yaitu lahan yang berupa tanah yang subur dan rata. Pada umumnya masyarakat Asera membuka lahan sekita 0,5 ha sampai 1 ha. Setelah pemilihan lokasi lahan, kegiatan selanjutnya adalah pembukaan lahan perladangan. Kegiatan pembukaan lahan ini dilakukan pada musim kemarau berupa pamarasan (*mosalei*), penebangan (*mombodoi/monduehi*) dan pembakaran (*humunu*).

Tahapan selanjutnya secara berturut-turut adalah aktivitas pemagaran (*mewala*), penanaman (*motasu*), perawatan tanaman (*mosaira*) dan pengawasan ladang (*meteia*), pemanenan (*mosowi*) dan terakhir memasukkan hasil panen ke dalam lumbung (*molonggo*). Pemagaran (*mewala*) merupakan salah satu bagian penting dalam aktivitas perladangan yang bertujuan memberi tanda pembatas lahan dan sekaligus mencegah masuknya hama babi atau gangguan hewan lainnya. Bagian penting lainnya adalah *motasu*, yaitu aktivitas penanaman benih padi, sayur-sayuran dan semacamnya yang pada umumnya dilaksanakan pada akhir musim kemarau.

4.3. Mitigasi Bencana dalam Sistem Perladangan Masyarakat Suku Tolaki

Masyarakat tradisional, sebagaimana halnya pada masyarakat peladang berpindah di Kecamatan Asera telah sejak lama mempraktekkan pengelolaan hidup yang ramah dengan lingkungan alam sekitar. Mereka memanfaatkan sumberdaya alam berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang menjamin keberlanjutan dan kelestarian alam.. Kearifan budaya lokal yang terbentuk dari aktivitas perladangan berpindah diaktualisasikan dalam pola-pola tindakan yang bersifat adaptif terhadap lingkungan ini memiliki kontribusi penting dalam mencegah serta mengurangi resiko bencana. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam tradisi perladangan berpindah teridentifikasi memiliki fungsi sebagai mitigasi bencana alam, khususnya bencana kebakaran hutan, erosi, tanah longsor dan banjir. Di bawah ini diuraikan beberapa tradisi dalam aktivitas perladangan berpindah (*monda'u*) yang mengandung pendidikan menghindari bencana alam yang telah dipraktekkan secara turun temurun.

1. Pemilihan Lokasi Perladangan (*Mongiikii ando'olo*)

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam aktivitas perladangan (*monda'u*) yaitu memilih lokasi lahan atau tanah yang akan digarap sebagai ladang atau *monggiikii ando'olo*. Adapun lahan yang akan dipilih untuk diolah dalam aktivitas perladangan adalah tanah yang rata. Hal ini dimaksudkan selain faktor kemudahan, baik dalam hal jangkauan maupun dalam hal pengolahan, juga agar terhindar dari erosi dan tanah longsor. Pertimbangan lain dalam pemilihan lahan adalah kesuburan tanah sehingga tidak perlu lagi menggunakan pupuk, terutama pupuk buatan yang mengandung zat kimia. Kesuburan tanah yang dipilih juga memungkinkan dilakukan budidaya tanaman tanpa dibajak sehingga kekuatan tanah tetap terjaga.

2. Pembakaran Lahan

Pembakaran (*humunu*) merupakan kegiatan yang bertujuan membersihkan ladang dari batang dan ranting kayu hasil pamarasan (*mosalei*) dan penebangan (*mombodoi/monduehi*). Sebelum melakukan pembakaran terlebih dahulu dilakukan *mekere* dengan cara membuat sekat bakar berupa batas lingkaran yang menungkin api tidak dapat menyeberang ke area lainnya selain yang akan digarap sebagai ladang. Adapun lebar batas sekat yang dibuat adalah 3 (tiga) – 4 (empat) meter. Selain sebagai akses untuk melakukan kontrol terhadap pembakaran juga berfungsi sebagai penghambat menjalarnya api ke lahan atau lokasi lainnya. Untuk memudahkan proses pembakaran, hasil kegiatan *mosalei*, *mombodoi* dan *mekere* dijemur terlebih dahulu dengan cara mendiamkannya selama satu bulan atau lebih.

Petani peladang memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menetapkan titik api sebelum melakukan pembakaran. Salah satu pertimbangannya adalah arah tiupan angin ketika pembakaran hendak dilakukan. Sempurna tidaknya hasil pembakaran sangat tergantung pada keakuratan dalam penetapan titik api. Pembakaran dilakukan secara serentak pada sore hari dengan melibatkan seluruh peladang. Mereka bergotong royong melakukan penjagaan sampai prosesi pembakaran sudah benar-benar tuntas. Bagian akhir dari prosesi pembakaran ini adalah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan kembali

pohon-pohon dan dahang-dahang yang belum terbakar hangus secara sempurna (*mo'enggai*) untuk selanjutnya dilakukan pembakaran ulang pada kesempatan berikutnya sebelum melakukan penanaman.

Pada proses pembakaran lahan tampak adanya fungsi perencanaan yang dijalankan secara kolektif oleh para peladang. Selain itu juga terdapat pengorganisasian melalui pembagian kelompok sehingga pengendalian api dapat dilakukan secara maksimal. Masyarakat peladang telah menerapkan sistem pembakaran lahan terkendali secara turun temurun tanpa mengakibatkan kebakaran hutan secara meluas.

3. Pemagaran Lahan dan Perawatan Tanaman

Mitigasi bencana pada aktivitas perladangan di Kecamatan Asera juga nampak pada tahapan pemagaran lahan dan pemeliharaan tanaman. Pemilihan jenis kayu dan tumbuhan yang digunakan untuk pemagaran didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan menahan erosi jika terjadi hujan keras. Sebelum dilakukan pembakaran lahan, untuk kepentingan pemagaran dilakukan pemilihan dan pemilahan jenis kayu hasil tebangan yang dapat digunakan sebagai pagar. Dengan cara ini, para peladang tidak perlu lagi menebang pohon kayu (baru) di hutan untuk melakukan pemagaran sehingga hutan yang tidak menjadi lokasi ladang tetap lestari.

Perawatan tanaman dilakukan tanpa menggunakan pupuk dan racun pestisida. Para peladang telah memiliki pengetahuan lokal tentang tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Pada saat pemilihan lokasi ladang, kesuburan tanah merupakan salah satu pertimbangannya. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi menggunakan pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Dalam rangka menghindari serangan hama tanaman, para peladang bersepakat melakukan penanaman benih secara bersamaan. Ini adalah pengetahuan lokal yang bersumber dari pengalaman dan telah dipraktekkan secara turun temurun. Meskipun hasil produksi yang diperoleh tidak sebanyak jika menggunakan teknologi modern, cara ini dianggap menghasilkan produksi yang lebih aman dan lebih sehat.

4. Penanaman Tanaman Keras Sebelum Meninggalakan Lahan

Setelah lahan mengalami penurunan kesuburan karena telah dimanfaatkan secara berulang-ulang, para peladang meninggalkan lokasi perladangan dan pindah ke lokasi yang baru. Sebelum meninggalkan lahan lama yang mereka sebut *anahoma*, mereka menanam tanaman keras seperti jati, pinus, kelapa dan sebagainya sebagai bukti kepemilikan.

Anahoma yang terwujud menjadi hutan belukar setelah ditinggalkan biasanya merupakan areal bekas olahan dari sejumlah peladang yang masih berasal dari satu keluarga besar (kerabat). Berdasarkan ketentuan hukum adat Tolaki, *anahoma* tersebut dapat digarap kembali oleh yang bersangkutan atau anak cucu mereka setelah sembilan tahun ditinggalkan. Konsep *anahoma* ini selain berfungsi sebagai identitas kepemilikan juga dimaksudkan agar hutan yang telah ditebangi untuk kepentingan perladangan dapat menghidupkan kembali. Penerapan konsep *anahoma* pada aktivitas perladangan masyarakat adat Tolaki memiliki fungsi ganda, selain sebagai identitas kepemilikan, mengembalikan kesuburan tanah sehingga dapat diolah kembali, pada akhirnya juga membuat fungsi hutan memelihara ekosistem dan keseimbangan alam tetap terjaga.

5. Kesimpulan dan Saran

Masyarakat Suku Tolaki yang tinggal di Kecamatan Asera memiliki kearifan lokal yang khas sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan dalam aktivitas perladangan berpindah. Kearifan lokal ini tidak terlepas dari kepercayaan dan adat istiadat yang diajarkan dan dipraktikkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan kearifan lokal tersebut masyarakat peladang juga dapat mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana. Pranata *monda'u* yang sarat dengan pendidikan resiko bencana membuat masyarakat tetap bertahan dan berhasil menjalani kehidupannya dengan baik. Tradisi perladangan, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam aktivitas *monda'u* mulai dari pemilihan lokasi, pembukaan lahan hingga penyimpanan hasil panen sarat dengan mitigasi terhadap bencana alam, terutama bencana banjir, longsor dan kebakaran.

Penelitian ini masih terbatas pada mitigasi bencana berupa antisipasi dan pencegahan terhadap bencana alam pada aktivitas perladangan berpindah (*monda'u*) dan belum dapat mengidentifikasi mitigasi bencana yang berkaitan dengan penanganan korban ketika bencana telah terjadi. Diperlukan kajian lebih lanjut dan bersifat komprehensif agar dapat menjadi acuan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Referensi

- [1] Hos, Jamaluddin dan Supiyah, Ratna. 2018. "Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan" dalam 20 Tahun Reformasi Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi (1998 – 2018). Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin kerjasama dengan Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI). Halaman 309 – 326.
- [2] Chalid, Pheni . 2006. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- [3] Anonim. 2013. "Arsip dan Manajemen Bencana di Negeri Cincin Api". *Arsip, Media Kearsipan Nasional*. Edisi 60. Januari – April 2013.
- [4] Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003.

- [5] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat 9.
- [6] Mubary, Abd. Halim. 2018. *Mitigasi Bencana dari Kearifan Lokal*. <http://aceh.tribunnews.com/2018/12/27/mitigasi-bencana-dari-kearifan-lokal?page=2>, diakses 31 Januari 2019
- [7] Suparmini, Sriadi Setyawati, Dyah Respati Suryo Sumunar. 2014. Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19, No.1, April 2014: 47-64
- [8] Borokoa. 2010. *Membangun Budaya Mitigasi Bencana Berbasis Potensi Kearifan Lokal Nias*. <http://niasonline.net/2010/09/21/membangun-budaya-mitigasi-bencana-berbasis-potensi-kearifan-lokal-nias/>, diakses 2 Februari 2019
- [9] Soendjoto MA, Wahyu. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Budaya dan Kearifan Lokal*. Banjarmasin: Mangkurat Press.
- [10] Marfai, Muh. Aris . 2012. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press